

Senin  Selasa  Rabu  Kamis  Jumat  Sabtu  Minggu1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan  Feb  Mar  Apr  Mei  Jun  Jul  Ags  Sep  Okt  Nov  Des

# Swasembada Pangan dan Politik Agraria

**BERNHARD  
LIMBONG**



**B**elakangan ini kita semakin galau. Harga produk pangan biji-bijian melonjak drastis. Bermula dari kemarau panjang yang melanda AS sebagai salah satu negeri penghasil gandum, keledai, dan jagung terbesar di dunia, kenaikan harga komoditas pangan dunia berdampak pada laju inflasi dan krisis pangan. Kegagalan bertambah karena Indonesia sendiri dilanda kekeringan yang cukup panjang. Kegagalan panen pun melanda.

Kondisinya semakin memprihatinkan karena pada saat bersamaan, hampir semua harga komoditas ekspor unggulan kita menurun cukup dratis seperti minyak kelapa sawit mentah (CPO), karet, kakao, dan kopi. Kenaikan harga bahan pangan, kemarau panjang, impor pangan tak terkendali, dan menurunnya harga komoditas ekspor unggulan sungguh memukul para petani, pekebun, petani garam, juga peternak. Data menunjukkan, dari 3,5 juta hektar perkebunan karet di Indonesia, 85% di antaranya melibatkan usaha rakyat. Sekitar 90% dari 1,3 juta hektar areal usaha tanaman kopi melibatkan petani

pekebun. Kondisi serupa terjadi pada usaha tani kakao. Untuk sawit, sekitar 43% dari 6,5 juta hektar perkebunan sawit merupakan kebun sawit rakyat.

Dampak yang patut diwaspadai tentu saja laju inflasi dan krisis pangan nasional.

Belum lama ini, Menteri Pertanian Suswono mensinyalir bahwa kekeringan belum mengganggu produksi pangan dan ketahanan pangan nasional, karena areal yang kekeringan sekitar 23.000 hektar dari total 13 juta luas areal sawah. Sebuah pertanyaan, bagaimana nasib ribuan petani pemilik sawah seluas 23.000 hektar tadi?

Dalam kaitan itu, Wamen Pertanian Rusman Heriawan pekan lalu mengakui target pencapaian swasembada pangan—beras, gula, kedelai, jagung, dan daging sapi pada tahun 2014 bakal sulit tercapai. Sebab, untuk swasembada pangan, target produksi padi harus mencapai 76,5 juta ton gabah kering giling, 29 juta ton jagung, 2,7 juta ton kedelai, 3,1 juta ton gula, dan 0,51 juta ton daging sapi.

## Politik Agraria

Data dan berbagai fakta di atas menunjukkan ada yang salah dengan politik agraria nasional kita. Kita dikaruniai 'bumi, air, dan kekayaan alam di atasnya' yang maha dahsyat kaya. Namun, filosofi 'dikuasai oleh negara' dalam Pasal 33 UUD 1945 belum terjabarkan secara tepat dan utuh 'untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.' Pasal 33 UUD 1945 sebagai saripati politik sosial ekonomi RI masih menjadi mimpi.

Politik agraria nasional kita belum menyentuh aspek paling fundamental dari kesejahteraan sebuah negara agraris dan bahari. Persoalan paling sentral substansial, yaitu politik agraria nasional yang tidak memihak kepada pembangunan perdesaan (74.000 desa) yang dihuni 72% penduduk Indonesia, entah sebagai petani, peternak, dan nelayan.

Perintah UU Pokok Agraria Tahun 1960, khusus tentang Land Reform (Reforma Agraria) sebagai pilar utama untuk mentransformasi masyarakat agraris-miskin ke masyarakat industri-maju, tidak pernah dijalankan secara sungguh-sungguh. Nasib lebih tragis terjadi atas Tap MPR No. 9 Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Visi hebat dan misi besar produk hukum yang lahir dari rahim reformasi itu tak kunjung berbuah.

Data Departemen Pertanian menyebutkan, luas lahan pertanian saat ini sekitar 13 juta hektar. Jika dibagi dengan jumlah 30 juta petani yang ada, berarti rata-rata luas lahan per petani hanya 0,3 hingga 0,4 hektar. Di sisi lain, setiap lima tahun konversi lahan pertanian untuk pertambangan, kawasan industri, industri jasa, dan kawasan permukiman mencapai 106.000 hektar. Akibatnya, produksi komoditas pertanian merosot.

Padaahal, UUD 1945 dan UUPA Tahun 1960 mengamanatkan, negara menjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kita juga sudah memiliki payung hukum berupa UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, diikuti PP No. 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan, PP No. 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Jika reforma agraria dijalankan sungguh-sungguh, Indonesia tidak hanya bisa swasembada pangan, juga memiliki potensi besar untuk menjadi Negara pengekspor terbesar untuk berbagai komoditi pangan. Untuk kedelai, misalnya. Meski produksi kedelai Indonesia hanya 1,8-2,2 ton per hektar, namun umur tanaman kedelai Indonesia hanya 85-90 hari. Di AS, produksi per hektar 2,9 ton, namun masa tanam 160-170 hari.

Ironisnya, Indonesia sebagai Negara agraris hanya memiliki luasan area kedelai 700.000 hektar. AS memiliki area kedelai 28 juta hektar dan Brasil 22 juta hektar.

Selain kedelai, Indonesia juga potensial mengembangkan gandum yang hingga hari ini 95% bergantung pada impor. Bahan dasar tepung terigu ini cukup potensial, namun tidak didukung teknologi dan pemasaran yang memadai. Hal itu bisa terlihat di Kabupaten Banjar Jawa Tengah yang memiliki 40 hektar lahan gandum. Petani di sana bisa memproduksi hingga 3 ton per hektar.

Para pengamat menilai, salah satu persoalan mendasar adalah keterlambatan pembangunan industri hilir sehingga kekayaan alam Indonesia kehilangan momentum memberi nilai tambah pada 'bumi, air, dan

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya'. Data Kemenperin tahun 2010, Indonesia mengekspor 46,83% dari total 23,5 juta ton CPO, biji kakao 559.000 ton, 77,36% diekspor, karet 2,8 juta ton, diekspor 81,88%.

Menanggapi hal itu, Menteri Perindustrian MS Hidayat mengakui pembangunan industri hilir Indonesia seharusnya sudah dimulai 15 tahun silam. Baru dalam dua tahun terakhir, Kementerian Perindustrian mulai fokus dengan pembangunan industri agro, kelapa sawit, kakao, dan karet. Hasilnya baru terlihat lima tahun lagi.

Masalah penting lainnya terkait politik anggaran. Seperti sering dikemukakan para ekonom dan analis, bahwa politik anggaran kita belum menyentuh ke hal-hal utama dan strategis sehingga belum terlihat dampaknya secara signifikan bagi 71,3% rakyat Indonesia yang tinggal di perdesaan. Padahal, volume APBN kita naik empat kali lipat dalam delapan tahun terakhir dan tahun 2012 mencapai Rp 1.548 triliun.

Pengesahan RUU Desa, RUU Hak Atas Tanah, dan RUU Perlindungan Masyarakat Adat yang saat ini diproses di DPR dan DPD terasa semakin mendesak. Produk hukum lain yang penting dan strategis ialah UU Ganti Rugi untuk 'mengimbangi' UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum. Kalau UU No.2/2012 lebih berpihak kepada investor, maka UU Ganti Rugi berorientasi pada pemegang hak atas tanah.

Politik hukum agraria kita juga seharusnya menelorkan UU Reforma Agraria sesuai amanat UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Tap MPR No. 9 Tahun 2001. Tanpa produk hukum yang kuat dan mengikat, Reforma Agraria sulit terwujud seperti yang terjadi hingga hari ini.

Tentu saja kehadiran semua UU itu belum menyelesaikan persoalan. Masih banyak aspek lain seperti sosial budaya, politik anggaran, dan terutama penegakan hukum ikut menentukan tingkat keberhasilan di lapangan. Misalnya, UU Tata Ruang yang tidak efektif karena kerap berbenturan dengan UU Otonomi Daerah yang memberi kewenangan kepada bupati/walikota membuat Perda Tata Ruang, termasuk untuk pertanian, kehutanan, pertambangan, industri, dan perumahan. Kasus alih-fungsi hutan lindung di Puncak menjadi hutan produksi atau areal persawahan di Karawang menjadi bandar udara memperlihatkan benturan itu.

Kasus-kasus tersebut tidak perlu terjadi kalau politik agraria dan politik hukum agraria kita berpegang teguh pada tiga pilar utama sekaligus patokan dasar, yaitu nilai-nilai filosofis-ideologis Pancasila, Konstitusi UUD 1945, dan UUPA 1960. Tanpa ketiga panduan dan patokan dasar itu, kita tak akan pernah bebas dari ancaman krisis pangan, gejolak harga pangan, dan impor pangan. Kita pun semakin jauh dari impian Bung Karno tentang kedaulatan di bidang politik, ekonomi, dan budaya (Trisakti).